

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Setelah menjalankan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Libra mulai tanggal 15 Januari 2018 hingga 17 Februari 2018, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan tempat apoteker melakukan praktek kerja kerfarmasian berupa asuhan kefarmasian yang memiliki peranan penting dalam mencapai kesehatan yang paripurna.
2. Seorang apoteker hendaknya memiliki kemampuan manajemen yang baik antara lain memiliki kemampuan dalam manajemen persediaan, manajemen personalia, manajemen keuangan, dan manajemen administrasi dalam mengelola sumber daya apotek.
3. Seorang apoteker harus mampu berperan aktif dalam pelayanan kefarmasian kepada pasien yaitu dengan melakukan analisis resep, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta mampu memberikan pelayanan swamedikasi demi tercapainya pengobatan yang rasional.
4. Seorang apoteker harus dapat melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewajiban secara profesional, disiplin, berwawasan luas dan dapat menjalin hubungan kerjasama dengan tenaga kesehatan yang lain.
5. Dengan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker telah memberikan pengetahuan, pengalaman dan keterampilan praktis bagi calon apoteker mengenai pengelolaan obat (pengadaan,

penerimaan, penataan, peracikan, penyimpanan serta pencatatan) serta memberikan kesempatan pada calon apoteker untuk memberikan pelayanan langsung kepada pasien dengan melakukan KIE.

6. Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) memberikan bekal kepada calon apoteker sebelum terjun langsung ke masyarakat, agar kelak dapat menjalankan profesinya dengan baik dan bertanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan POM RI (2013). Peraturan Kepala Badan POM RI No. 40 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Prekursor Farmasi dan Obat Mengandung Prekursor Farmasi. Jakarta.
- Gilman, A.G., 2012 *Goodman & Gilman Dasar Farmakologi dan Terapi*, diterjemakan oleh Tim Alih Bahasa Sekolah Farmasi ITB, edisi X, 887, Penerbit Buku Kedokteran, EGC, Jakarta.
- Katzung, B.G. 2011. *Farmakologi Dasar dan Klinik Edisi 10*. Penerbit Buku Kedokteran EGC. Jakarta
- Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Standar pelayanan Kefarmasian di Apotek. Kepmenkes Nomor 73 tahun 2016.
- Lacy, F. C., Armstrong, L. L., Goldman, P. M. and Lance, L. L., 2009,*Drug Information Handbook*, ed. 17th, American Pharmacists Association, North American.
- McEvoy, G. K., 2011, *AHFS Drug Information Essential*, American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Bethesda, Maryland.
- Menkes RI, 2002, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Menkes RI, 2004, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1027/Menkes/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Menkes RI, 2009, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Menkes RI, 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 35 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Jakarta.

Menkes RI. (2014). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.

Menkes RI. (2016). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Jakarta: Departemen Kesehatan RI.

Menkes RI, 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, Menteri Kesehatan, Jakarta.

MIMS Indonesia Petunjuk Konsultasi Edisi 17, 2017/2018. PT. Info Master, Jakarta.

- Neal, M.J. 2006. At a Glance Farmakologi Medis Edisi Kelima.  
Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI tentang Ketentuan dan Tata Cara  
Pemberian izin Apotek, Permenkes Nomor 922 / MENKES /  
PER / X / 1993.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Tentang Apotek, Permenkes No. 9  
Tahun 2017.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Tentang Perubahan Penggolongan,  
Permenkes Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan  
Penggolongan Narkotika
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Tentang Perubahan Penggolongan  
Psikotropika, Permenkes Nomor 3 Tahun 2017.
- Presiden RI, 2009, Undang-Undang Republik Indonesia No. 36  
Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Presiden Republik Indonesia,  
Jakarta.
- Presiden RI, 2009, Undang-Undang No. 35 tentang Narkotika,  
Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
- Seto, S., Nita, Y. dan Triana, L., 2012. Manajemen Farmasi :  
Lingkup Apotek, Farmasi RumahSakit, Pedagang Besar  
Farmasi, Industri Farmasi, ed. 2, Penerbit Universitas  
Airlangga, Surabaya.

Sweetman, S. C., 2009, Martindale The Complete Drug Reference, ed.

36<sup>th</sup>, The Pharmaceutical Press, London.

Tatro, D. S., 2003, A to Z Drug Facts, Facts and Comparisons.